



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pj. Bupati Barito Selatan : B- 901 / SETDA / AS.I-HUK / 180 / 11 / 2024, tanggal 29 November 2024, Perihal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 dan berdasarkan hasil Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 16 Desember 2024, dalam rangka Pembahasan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, disepakati rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebanyak 19 (sembilan belas) Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pasal 4 ayat (9) dan ayat (10) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan pada pokoknya hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang telah disepakati, ditetapkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

8. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 33);

- Memperhatikan :
1. Surat Pj. Bupati Barito Selatan : B- 901 / SETDA / AS.I-HUK / 180 / 11 / 2024, tanggal 29 November 2024, Perihal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
 2. Hasil Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, dalam rangka Pembahasan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, tanggal 16 Desember 2024;
 3. Rapat Paripurna ke – 11 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 17 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berjumlah 19 (sembilan belas) Rancangan Peraturan Daerah.
- KETIGA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 Desember 2024

**KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



M. FARID YUSRAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua Bapemperda Kab. Barseel di Buntok.
5. Sekretaris Daerah Kab. Barseel di Buntok.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Barseel di Buntok.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025**

NO.	JUDUL RANCANGAN PERDA	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA RANCANGAN PERDA	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1.	Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2045	Dinas PUPR	Januari	Lanjutan Propemperda Tahun 2024
2.	Rancangan Perda tentang Pengelolaan Perparkiran	Dinas Perhubungan	Januari	Lanjutan Propemperda Tahun 2024
3.	Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Rancangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Januari	Lanjutan Propemperda Tahun 2024
4.	Rancangan Perda tentang Masyarakat Hukum Adat	Dinas Lingkungan Hidup	Januari	Lanjutan Propemperda Tahun 2024

5.	Rancangan Perda tentang Penetapan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Maret	Lanjutan Propemperda Tahun 2024
6.	Rancangan Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan	Maret	Lanjutan Propemperda Tahun 2024
7.	Rancangan Perda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	Inspektorat Daerah	Maret	
8.	Perda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	April	Lanjutan Propemperda Tahun 2024
9.	Rancangan Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	April	
10.	Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	April	
11.	Rancangan Perda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	April	

12.	Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Mei	
13.	Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan	Bagian Kesra Sekretariat Daerah	Mei	
14.	Rancangan Perda tentang Rencana Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Selatan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Mei	
15.	Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Mei	
16.	Rancangan Perda tentang Pengelolaan Perikanan Darat	Dinas Perikanan	Juni	
17.	Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024	BPKAD	Juni	

18.	Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025	BPKAD	September	
19.	Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026	BPKAD	September	

**KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,**
M. FARID YUSRAN